

Australian National University (ANU) - The SMERU Research Institute (SMERU)

FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN (FKP) 2026

"Di Balik Gunung Sampah: Kontribusi, Kerentanan, dan Kesejahteraan Pemulung Bantargebang"

Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026

SUARA DARI BANTARGEBAH: SEJARAH, REALITAS DAN HARAPAN KOMUNITAS BANTARGEBAH"

Bagong Suyoto, SH, S.IP, S.Pd, MM, M.Si
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan
Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)



BAGONG SUYOTO MELAKUKAN ADVOKASI DI BANTARGEBAH SEJAK 1999 SAMPAI 2026

“Mulai berjenjot hingga beruban dan ompong”

Hampir setiap hari berinteraksi dengan pemulung, pelapak, tukang sortir, sopir truk sampah, pegawai TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu, warga, dan lainnya. Dari pergumulan advokasi itu menghasilkan ribuan tulisan ilmiah, populer, dan lainnya. Bantargebang menjadi laboratorium sosial ekonomi, kemanusiaan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Perjalanan advokasi tersebut ditulis dalam buku “JALAN TERJAL ADVOKASI PENGELOLAAN SAMPAH”.



PERMASALAHAN KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN KETERBELAKANGAN PEMULUNG SUDAH DISAMPAIKAN KE BERBAGAI PIHAK: DARI PEMERINTAH LOKAL HINGGA PUSAT

Pengelolaan Sampah Perlu Payung Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sampah di berbagai daerah di Tanah Air masih belum optimal. Ini lantaran rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan jajaran birokrasi dan kalangan pelaku usaha dalam mengelola sampah. Untuk itu, perlu segera disusun payung hukum nasional yang mengatur persampahan lintas daerah.



Rachmat Witoelar

Demikian benang merah dialog nasional dengan tema "Mencari Solusi Pengelolaan Sampah di Indonesia" di Jakarta, Sabtu (4/6).

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dalam sambutannya, memaparkan pengelolaan sampah perlu ada pendekatan secara menyeluruh. Salah satunya, dengan menyusun payung hukum, yakni undang-undang yang mengatur persampahan. Jika aspek perundang-undangan yang menjadi payung hukum ini ditunda pembahasannya, penyelesaian persoalan sampah dikhawatirkan kembali ditangani dengan pendekatan parsial dan reaktif.

Pembenahan institusi, terutama di tingkat lokal dan regional, harus segera dilakukan. Pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten, lanjut Rachmat, seringkali memikul beban yang tumpang tindih, baik sebagai pelaksana, perencana, dan pengawas. Oleh karena itu, perlu ada upaya revitalisasi dan reposisi kelembagaan di daerah.

Di tingkat regional, seperti di kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung, perlu ada kebijakan na-

sional yang memayungi kepentingan lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi dalam konteks kerja sama di bidang pengelolaan sampah. "Ini bukan hanya dalam penanganan konflik, tapi juga pembiayaan investasi dan operasional seperti pembangunan tempat pembuangan sampah regional," ujar Rachmat.

Perlu badan permanen

Direktur Pusat Industri Daur Ulang Sampah dan Zero Waste Indonesia, Bagong Suyoto, menambahkan bahwa pengelolaan sampah kota perlu suatu institusi atau badan yang memiliki otoritas permanen dan penuh secara nasional dan bertanggung jawab pada Presiden. "Pihak-pihak yang menjalankan program daur ulang hendaknya mendapat dukungan keuangan, kemudahan memperoleh kredit, dan akses pasar," ungkapnya. Bagong Suyoto menilai, ke-

lemahan mendasar dari perencanaan pengelolaan sampah yang terjadi di kota-kota besar adalah pemahaman terhadap pengelolaan sampah yang masih setengah-setengah, dipahami sebatas proyek, dan dijadikan komoditas politik.

"Pengelolaan sampah bukan semata-mata mengandalkan teknologi canggih, tetapi juga harus melihat kondisi lingkungan alam, sosial dan budaya," ujar Bagong. Pelibatan masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya bukan hanya pada tahap perencanaan, melainkan juga dalam implementasi dan evaluasi agar keberadaan tempat pembuangan sampah akhir diterima oleh warga sekitarnya.

Ketiadaan payung hukum secara nasional juga memicu penyelesaian konflik kepentingan pengelolaan sampah antara dua daerah atau lebih secara serampangan atau meminta petunjuk pada instansi di atasnya. "Tidak adanya payung hukum membuat hampir tiap orang membuang sampah sembarangan karena tidak ada sanksi tegas," kata Bagong menambahkan.

Sementara itu, Sarwono Kusumaatmadja—anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta—menyatakan, di era otonomi daerah pengelolaan sampah juga harus melibatkan pemerintah daerah. Untuk mempercepat penerbitan payung hukum penanganan sampah, pihaknya siap membentuk tim kerja yang terdiri atas para anggota DPD di berbagai daerah di Tanah Air. (EVY)



UNIVERSITAS INDONESIA

MORAL 2.0
SCORP CIMSA UI

moral 2.0

PRE-EVENT PUBLIC DISCUSSION

ABDUL GHOFAR
POLYTHON AND URBAN JUSTICE CAMPAIGN MANAGER YAYASAN PERUBAHAN MELU BERKEMAS MARIH

ANNISA AZZAHRA
PUBLIC POLICY ASSISTANT PEMERINTAH KABUPATEN BANGUNRELAU LON WAMBEXPOSIA PIRE

BAGONG SUYOTO
KETUA EKSPER PERAMPANGAN PERUMPA KETUM

MUHAMMAD RAJIF
REHA OHS-ER PENGELOLA SAMPAH TERPADU, DANG LINDUNGAN WOL POKYVA SE JAKARTE LPE SINDI

Pencemaran Udara pada TPST Bantargebang dan Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Kelompok Rentan Ibu dan Anak

Saturday, 14 December 2024 | 10.00-12.05 GMT +7
Online via Zoom Meeting

Register Now via bit.ly/RSVPMoral2



BAGONG SUYOTO

MEMBONGKAR BELUNGGU PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA



MEMBONGKAR BELUNGGU PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA

Pengelolaan sampah Indonesia dalam belunggu sangat kuat. Permasalahannya *complicated* dan rumit, dari atas hingga bawah akibat terjerat paradigma: Kumpul-Angkut-Buang. Sampah dari sumber hingga TPA/TPST tak terpilah dan hanya ditumpuk secara terbuka (*open dumping*) menjadi gunung gunung sampah. Sebagian gunung sampah itu langsung memakan korban nyawa dan harta benda. Sistem yang dilarang oleh UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Belunggu semakin kuat ketika sampah impor dari berbagai negara membanjiri Indonesia. Sampah impor terindikasi mengandung limbah B3 begitu berkuasa. Dampaknya cukup luas dan kompleks. Fakta menyedihkan sekali, bahwa sisa-sisa sampah impor dibuang sembarangan, pekarangan kosong, sawah, DAS, bahkan yang parah ditemukan "kuburan-kuburan sampah impor", sebagian dibakar di alam terbuka dan bahan bakar masak maskanikan sebagai modus menghilangkan jejak.

Umumnya kondisi TPA *open-dumping* sangat bunik, jorok, bau, penuh belatung dan lalat. *Image*-nya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia. Mayoritas kabupaten/kota di Indonesia masih cinta TPA *open dumping*, padahal peradaban dunia makin maju, modern, canggih dan cinta pada lingkungan bersih dan sehat. Penyakit apa yang sedang menghinngapi para kepala daerah itu?

Pemmasalahan menyamakan ketika pembuangan sampah di pekarangan kosong, irigasi, pinggir jalan, DAS dan badan sungai tumbuh bak jamur di musim hujan. Sejumlah sungai di wilayah Jabodetabek dipenuhi sampah ketika hujan turun. Berbagai jenis sampah itu bewarna di pesisir jadi paku baru dan lainnya mengambang di laut. Kasus Kali Cisadane Tangerang, Kali CBL Kabupaten Bekasi merupakan contoh nyata, kita sedang merusak sungai dan alam bagaikan "menuju hari-hari akhir di bumi ini". Moralitas dan keabakan kita tergilas oleh sampah padat dan cair menuju lautan lepas. Bagaimana kita akan menangan sampah secara tuntas untuk menyejahterakan masyarakat?

Pemerintah pusat, beberapa pemerintah kabupaten/kota dan lembaga persampahan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut, juga melakukan pengawasan dan *low-enforcement* sebagai bagian membongkar kejahatan lingkungan terhadap praktik-praktek TPA ilegal, *open dumping*, pembuangan sampah sembarangan, dll. Sayangnya, rantai belunggunya begitu kuat bak batu barang. Butuh keberanian, kecepatan, kesungguhan, anggaran, infrastruktur, teknologi, pelibatan banyak orang dan waktu lama untuk membuka belunggu tersebut.

BAGONG SUYOTO

"BLUWENG": MENCARI MESIAS DI TENGAH GUNUNGAN SAMPAH



"BLUWENG": MENCARI MESIAS DI TENGAH GUNUNGAN SAMPAH

Judul buku ini adalah "*Bluweng*: Mencari Mesias di Tengah Gunung Sampah". *Bluweng* merupakan istilah lokal yang dipungut dari muara masyarakat klsaran tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang, Bekasi. Makna lugas dari istilah *Bluweng* adalah pusing tujuh keliling atau manesia dalam kondisi sedang buntu. Buku ini lebih banyak mengulas sisi-sisi lain kehidupan pemulung dan penduduk sekitar TPA Bantar Gebang, yang berpengaruh langsung terhadap iklim persampahan secara mikro dan makro di Indonesia.

Dimensi sosio kultural, ekonomi, religius, keyakinan (kegaliban), biologis, kesehatan dan lingkungan yang besirat dalam uraian-uraian akan dapat membuka mata semua orang. Di sini ada perempuan pemulung, kuli sobek plastik kresek, sorir plastik dan selensunya. Selain itu pekerjaan domestik, perempuan lokal menganyam kerajinan bambu, mengembala kambing. Juga ada anak-anak tejebak dalam gunung sampah. Mereka berkerja membantu mencari nafkah orang tuanya yang miskin.

Keluarga pemulung hidup dalam gubuk-gubuk kardos, triplek bekas, karung bodol dan kumah dan makan dengan menu seadanya, termasuk "makan sampah". Mereka hidup dengan sanitasi buruk, tanpa air bersih, tanpa MCK layak. Kemiskinan dan penderitaan melekat dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup semakin susah mereka mencari Sang Mesias, dewa penyelamat yang dapat mengangkat nasibnya dan gunung sampah. Mereka dengan beramat susah, pada suatu titik tertentu menemukan mesias sejati. Mesias itu adalah manusia, pemimpin yang memiliki akhlak mulia dan adil. Manusia yang mempedulikan penderitaan rakyat, persampahan, kesehatan, lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM).

Berbagai kasus persoalan sampah di sejumlah daerah di Indonesia, kasus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), termasuk masalah longgornya TPA Leuwigajah dan TPA Bantar Gebang, bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada daerah masing-masing. Tetapi harus ditangani secara terpadu, kolaboratif melibatkan berbagai stakeholders. Penanganan sampah harus menjadi prioritas utama nasional.

Langkah efektif sebagai pijakan dasar, *Pertama*, diperlakukan regulasi yang dijalankan secara serius. Kedua, adanya tekanan dari Presiden RI dan dukungan serta komitmen para petinggi republik ini. Dalam suasana mendesak jangka pendek, Presiden harus menetapkan opsi atau strategi penanganan sampah yang jelas. Ketiga, menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) Pengelolaan Sampah secara Nasional untuk jangka 5 - 10 tahun ke depan. Penyusunan Rencana Aksi tersebut harus melibatkan semua stakeholders. Dan, dalam implementasi perlu adanya monitoring dan review yang ketat dan berkelanjutan serta penegakan hukum yang tegas.

BAGONG SUYOTO

JEJAK LASKAR PEMULUNG



JEJAK LASKAR PEMULUNG

Buku ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan kerjasama yang erat dengan para pemulung di sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Indonesia. Penulis membuat dokumen bersejarah bertajuk: "JEJAK LASKAR PEMULUNG". Merupakan jejak langkah anggota Laskar Pemulung dari kurun waktu panjang, 2000-an hingga 2003, naskah direvisi Desember 2009 dan terakhir 2023.

Wama kehidupan para pelaku diulas totalitas mulai dari usia belia hingga renta. Drama kehidupan kaum pemulung di tengah-tengah kemiskinan, kebodohan, keterbelakang serta struktur kekuasaan dan masyarakat yang menindas menjadi point penting yang disoroti secara tajam dan rinci. Mereka terus berjuang ingin lepas dari kerangkeng, selanjutnya bebas dan mandiri tetapi tidaklah mudah! Karena posisi pemulung yang tidak berdaya (*powerless*).

Dengan empati mendalam dan membiarkan hubungan homoplik berlangsung, penulis berinteraksi dengan kehidupan mereka secara total. Penulis menempatkan mereka dalam derajat yang tinggi, membesarkan hatinya, bahwa mereka telah membantu mereduksi, memanfaatkan kembali dan daur ulang sampah, bagian dari kerja 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Siapa yang mau membersihkan "kotoran penuh najis" orang-orang kaya kota? Mereka, orang-orang kota tak peduli dengan kotoran penuh najis dan bau, sisa aktivitas mereka yang disebut sampah. Kotoran penuh dengan benih penyakit, dan benda-benda tajam berkarat dengan ancaman tetanus. Pemulung bertindak nyata dan hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk mengelola sampah. Peran dan jasanya sangat besar bagi negeri ini.

BAGONG SUYOTO

PEMULUNG TERANCAM WABAH COVID-19 DAN KRISIS EKONOMI



PEMULUNG TERANCAM WABAH COVID-19 DAN KRISIS EKONOMI

Pandemi Covid-19 menjadi suatu ancaman tersendiri yang belum pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Wabah Covid-19 menimbulkan krisis multidimensi di seluruh dunia, merietan jutaan korban jiwa di dunia. Semua orang merasakannya. Berbagai aktivitas diperlambat dan dihentikan, kemudian diterapkan lockdown. Karantina wilayah dan di Indonesia dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampaknya limbah medis bekas penanganan Covid-19 mengalami peningkatan tajam 30-50%. Berbagai media massa dalam dan luar negeri membentasi pandemi Covid-19 lampa henti selama beberapa tahun. Nyaris seluruh negara di dunia kewalahan menangani limbah medis tersebut, termasuk Indonesia.

Sektor informal, seperti pemulung, pelapak dan buruh persampahan terkena dampak sangat parah. Harga-harga pungutan sampah terjun bebas, sampah gabrogan/campuran pada kondisi normal Rp 1.200/kg, terjun sampai Rp 500-600/kg, belum lagi polong 10-15%. Pemulung mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian pabrik daur ulang hup, bahkan bunyinya di-PHK. Beberapa bospelapak di kawasan Bantargebang pulang kampung duluan karena modal meripis dan bangkrut. Mereka takul dikajar-kejar karena tidak bisa membayar barang seloran pemulung dan buruhnya.

Kelaparan pangan mereka ringkih dan jumlahnya belum didata secara akurat dan valid. Mereka buluh makan. Sayangnya, distribusi Bansos tidak merata. Prinsip pemerataan dan keadilan dihantui pandemi Covid-19. Pemberian bantuan Sembako biasanya hanya di pos terkentu dan di pinggir jalan utama. Mustinya ada pemelanan sebaran pemulung, bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh pemulung, komunitas dan lembaga yang mengurus pemulung.

Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Sekeloa Perangi Semesta Alam (SPSA) meminta agar pemerintah pusat menyusun data base yang akurat dan valid tentang profil pemulung di Indonesia dan setiap tahun diperbarui. Koalisi pemulung rentan, seperti keekukan pangan, papan, kesehatan, dll. Karena itu pemerintah harus intervensi melayani, mencukupi dan melindungi kebutuhan hidup kelompok informal tersebut.

PERTANYA BERSAR YANG SULIT DIJAWAB

SISTEM EKSPLOITATIF DAN **RENTE** PENGELOLAAN SAMPAH (SEKTOR INFORMAL) DI BANTARGEBAH SULIT MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN PEMULUNG

PEMULUNG HANYA JADI ALAT PRODUKSI DAN KULI YANG HIDUPNYA SEMAKIN SULIT DAN TERLILIT HUTANG PENUH RENTE

KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARGEBAH MURNI BERSIFAT BISNIS, MULAI DARI MENGAIS SAMPAH, SORTIR, BONGKAR MUAT, PENCACAHAN PLASTIK HINGGA PABRIK DAUR ULANG. UPAH KERJA DITENTUKAN OLEH PARA BOS DAN **PEMULUNG TIDAK PUNYA DAYA TAWAR.**

BAGAIMANA MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEMULUNG AGAR HIDUP SEJAHTERA?

SUDAHKAH KITA PUNYA MODELNYA?

**FAKTA MENGERIKAN? SIAPA ORANG PENTING DI NEGERI
INI YANG PERNAH MENGINAP DI GUBUK PEMULUNG?!
OBYEK DAN FOKUS PENELITIAN SANGAT MENANTANG**



Foto: KPNas/APPI, 22/5/2026

BAGONG SUYOTO

TRAGEDI MAUT DI TPA BANTARGEBAANG



TPST BANTARGEBAANG LONGSOR MENELAN 3 KORBAN NYAWA PADA 2006



TRAGEDI MAUT DI TPA BANTARGEBAANG

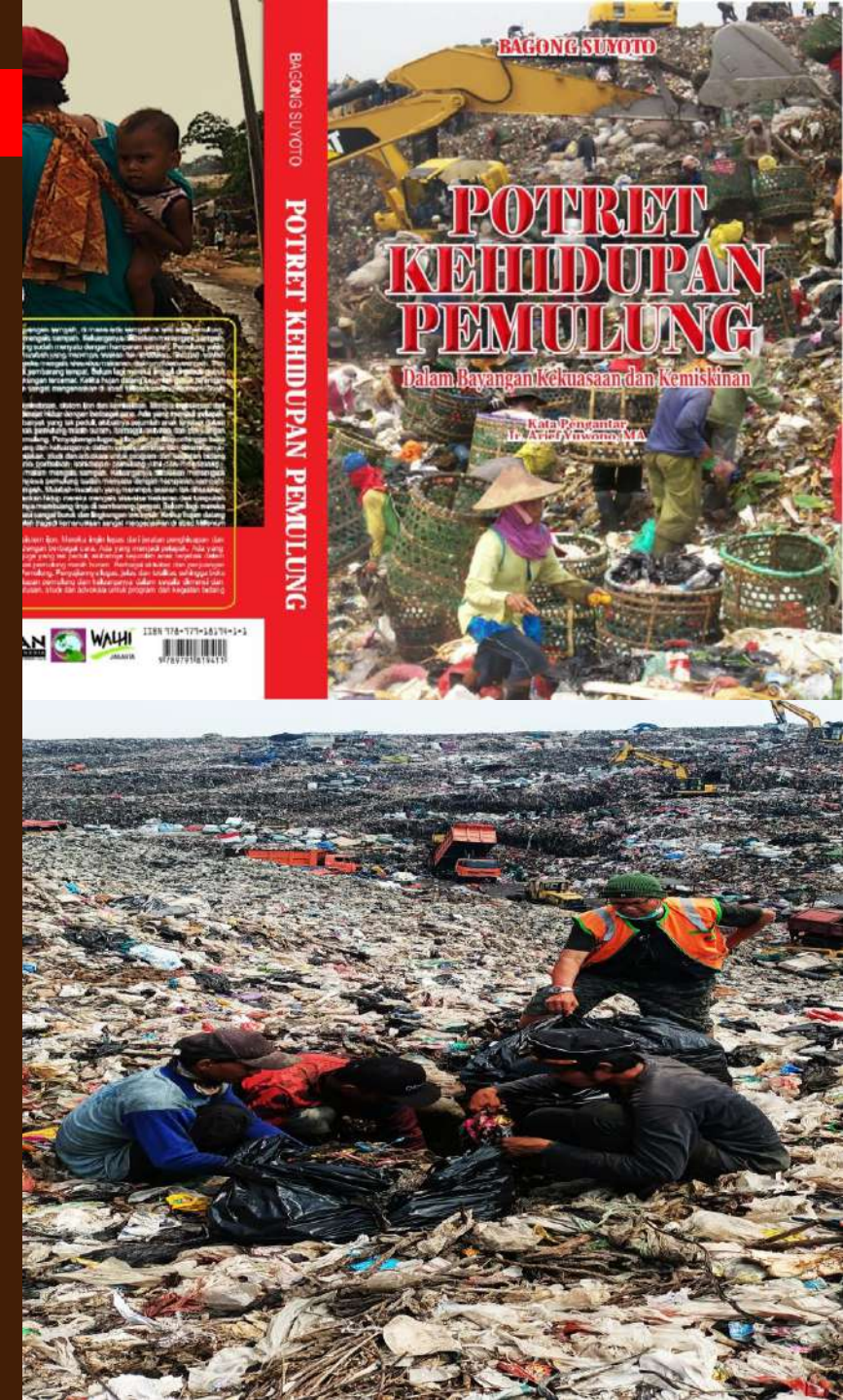
Buku yang ditulis ini merupakan hasil investigasi langsung, dan bagian kecil dari pengalaman lapangan sejak tahun 2000-an hingga 2010-an. Tulisan ini mencerminkan keprihatinan mendalam penulis atas kemelut dunia persampahan di Indonesia yang tidak kunjung usai. Padahal berbagai program penanganan, pengolahan sampah dilakukan berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Sampah longsor menjadi isu utama, dan sampah longsor itu membawa korban manusia. Kasus sampah longsor terjadi di TPA Leuwigajah Kota Cimahi menelan ratusan nyawa dan tempat tinggal tahun 2005, TPS Lembah Ampora Kabupaten Bandung menewaskan beberapa orang, dan yang terbaru TPA Bantar Gebang longsor menewaskan 4 nyawa dan lainnya luka-luka tahun 2006. Semua itu akibat kesalahan dan kecerobohan manusia, para pengelola TPA tidak mentaati standar operasional prosedur (SOP) atau ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional dan internasional, meskipun mereka mengklaim menerapkan sistem *sawitay landfil*, kenyataannya tetap saja menerapkan *open dumping*. Persoalan sampah yang dianggap sepele hanya membuahkan tragedi menyayat hati.

Pengalaman pahit itu hendaknya menjadi bahan pelajaran berharga dan tetap menjadi bagian sejarah pengelolaan sampah di Indonesia. Makna sejarah ini adalah ingatlah peristiwa-peristiwanya, ambilah hikmahnya. Mulailah membenahi kondisi buruk tersebut, mulai aksi positif: TPA Bantar Gebang menuju *recovery estate*. Pencitraan yang baik harus dimulai dari Bantar Gebang

A. PERMASALAHAN TPST BANTARGEBAH

1. Luas TPST Bantargebah 108 menjadi 110,5 hektar (meliputi wilayah Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu
2. Dioperasikan tahun 1989
3. Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Sampah yang dikirim ke TPST sebanyak 7.500-7.800 ton/hari, ketika banjir mencapai 12.000 ton/hari.
5. Punya berbagai teknologi pengolahan sampah, tingkat reduksi 15-20%.
6. Pada 1990-an jumlah pemulung ratusan orang pindahan dari Cakung Cilicing Jakarta, karena sampah yang dibuang 4 sampai 10 truk. Dalam perjalanan waktu terus bertambah, tahun 2000-an sudah mencapai 5.000 pemulung.
7. Tahun 2015/2016 jumlah pemulung 7.000 – 8.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia (muncul gubuk-gubuk kumuh).
8. *Leachate* belum terkelola dengan baik, sebagian masuk kali.





BAGONG SUYOTO

DIBALIK TRAGEDI
TPA BANTAR GEBANG
(Resistensi Masyarakat di Bantaran Metropolitan)

INVESTIGASI 1999 - 2004

BAGONG SUYOTO
DIBALIK TRAGEDI TPA BANTAR GEBANG

Book description: **TPA Bantargebang** (TPA Bantargebang) is a large-scale waste management facility in Bekasi, West Java, Indonesia. The book, written by Bagong Suyoto, is a critical investigation into the environmental and social impacts of the facility. It details the resistance of the local community against the expansion of the TPA, which has led to significant environmental degradation and health risks. The book is a key resource for understanding the challenges of waste management in rapidly growing urban areas.

Pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan sangat massif. Kondisi lingkungan hidup TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu 2000-2008



**LANDSCAPE WILAYAH SEKITAR TPST BANTARGEBAK, LINGKUNGAN CALON TPA
SUMURBATU DAN PEMUKIMAN PEMULUNG TAHUN 2000**



PERUBAHAN HARGA TANAH DI SEKITAR TPST BANTAGEBANG 1985-2026

TAHUN	HARGA TANAH/M2	KETERANGAN
1985-1989	300-500	Pembabasan lahan untuk rencana Pembangunan TPST Bantargebang. Tanah bekas galian, sawah, lahan darat. dan lainnya
1990-1995	2.000-2.500	Harga tanah masih murah
1996-2000	25.000-50.000	Mulai banyak pendatang, terutama pemulung di sekitar TPST Bantargebang. Dampaknya harga tanah naik
2001-2016	250.000-500.000	Tumbuhnya gubuk-gubuk pemulung dan perlapakan sampah
2017-2021	700.000-1.000.000	Pembangunan IPLT dan TPA Sumurbatu dan Pembangunan pabrik-pabrik daur ulang
2022-2026	1.200.000-2.500.000	Pembangunan perusahaan pengolahan limbah industri/B3, pabrik daur ulang, pergudangan, workshop, toko material, perluasan TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.

Sumber: Penggalian data lapangan dilakukan sejak tahun 1999 (KPNas/APPI, Bagong Suyoto)



LAHAN SAWAH DIKONVERSI JADI ZONA-ZONA TPA SUMURBATU TAHUN 2002-2005





C. JUMLAH PEMULUNG DAN PELAPAK DI BANTARGEBAH DAN BURANGKENG

No	Wilayah Kegiatan	Jumlah Pemulung	Jumlah Pelapak
1	TPST Bantargebang	6.000	
2	TPA Sumurbatu	400	
3	TPA Burangkeng	250	
4	Sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu		600
5	Sekitar TPA Burangkeng		20

Sumber: Data primer, KPNas/APPI, 29 November 2025. Data tersebut perlu diverifikasi, selanjutnya dilakukan survey dan pemutakiran.



D. PROFIL PEMULUNG (BUKU PROTET KEHIDUPAN PEMULUNG, 2015)



No	Pemulung Lokal	Pemulung Pendatang
1	Penduduk lokal Kelurahan Sumurbatu, Ciketingudik, Cikiwul, Bantargebang, Pedurenan Kota Bekasi, Desa Tamanrahayu, Desa Burangkeng Kabupaten Bekasi	Berasal dari Medan, Padang, Palembang, Lampung, Banten, Babelan, Karawang, Subang, Indramayu, Palimanan, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Solo, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Malang, Madura, dll
2	Status kependudukan: legal standing-nya jelas memiliki KTP, KK, rekening Listrik, SPPT/PBB, rekening uang bau, dll	Status kependudukan asal daerah dan ada yang tidak punya KTP/KK
3	Sebagian mengais merupakan pekerjaan utama dan pekerjaan sambilan	Mengais sampah merupakan pekerjaan utama, menetap dan Sebagian menikah dengan penduduk lokal
4	Dalam manajemen pemulung berstatus sebagai pelapak	Pemulung pendatang ada yang bersifat musiman, setelah bercocok tanam dan akan panen kembali ke kampung
5	Tinggal berbaur dengan komunitas/penduduk lokal	Tinggal berbaur dengan pemukiman komunitas pemulung dan pelapak kecil
6	Kondisi bangunan permanen dan semi-permanen, rata-rata di atas tanah sendiri, karena mendapat warisan orang tua	Kondisinya berupa gubuk-gubuk berjajar, kumuh, sanitasi buruk, rata-rata di tanah yang disewakan para bos pemulung/pelapak. Atau menyewa sendiri pada pemilik tanah dan membuat gubuk sendiri
7	Mendapat uang bau Rp 400 ribu/KK/bulan	Tidak mendapat uang bau
8	Sebagian pemukiman bersih, mendapat air bersih dari sumur dalam bantuan Pemprov DKI Jakarta	Tidak mendapat bantuan air bersih dari sumur dalam (artesis)
9	Berobat gratis ke Puskesmas dan rumah sakit rujukan	Berobat berbayar pada dokter atau tenaga medis sekitar

Sumber: Data primer, KPNas/APPI, 29 November 2025., dilakukan pemutakiran data.

Bahwa semua tindakan pemulung rasional perdefinisi "ekonomis" dan model ekonomi semua bagi perilaku. Sebagaimana Talcott Parsons, Robert K. Merton, Peter M. Blau (sosiolog terkemuka) percaya, bahwa setiap orang mencapai tujuan secara rasional tetapi tujuan-tujuan itu dirintangi oleh berbagai kendala dalam struktur sosial. Sebagaimana yang kita lihat, kekuasaan adalah suatu fenomena yang harus mendapat pertimbangan khusus. *Orang bebas memilih tujuan-tujuan mereka, tetapi hanya diantara alternatif-alternatif yang telah ditentukan secara struktural.* Artinya struktur kekuasaan sangat menentukan keberadaan pemulung. (Tri Bangun L Sony & Bagong Suyoto, 2008; Bagong Suyoto, 2015)

Amir Sodikin dan Khairina wartawan *Harian Kompas* (10 Septembert 2006) mengutip pernyataan penulis, mereka (pemulung) sebenarnya hidup dalam kemiskinan struktural karena berada dalam dasar rantai bisnis sampah. Pemulung tidak independen menentukan harga, bahkan untuk memilih pembeli yang lebih baik pun tak bisa. Mereka harus menyetor kepada bos. Jika sampah campuran atau *gabrugan* di pasaran Rp 700 per kilogram jika disetor ke bos hanya Rp 500 per kg. Selisih harga sebagai kompensasi pembiayaan, mulai dari gubuk, listrik, air, beras, jajan tiap hari, hingga pinjaman menyekolahkan anak. (Ibid)

Hubungan-hubungan antara pemulung dan bos mencakup kaidah-kaidah dalam hubungan *patron and client* dalam konteks sosiologis. Tidak bisa hanya dipahami sebagai hubungan kerja (impersonal) antara anak buah dan bos dalam konteks ekonomi, melainkan ada aspek perlindungan dan keamanan, bahkan serigkali menyentuh aspek kekerabatan, aspek religius, dsb. Hubungan *patron-client* dijelaskan Joseph Errington dalam Tri Bangun L Sony dan Bagong Suyoto (2008) berikut.

Patron/client relations were conceptualized and idealized in terms so general as to be applicable to any social relation involving superior and inferior: "the relationship between servant and master is not impersonal; it is rather a personal and close ties of mutual respect and responsibility. Ideally it is modeled after the care and love of family ties" .

Artinya, hubungan-hubungan *patron-client* dikonsepsikan dan diidealkan ke dalam istilah yang umumnya diaplikasikan pada hubungan sosial melibatkan pihak si lemah dan si kuat: "hubungan antara kawula dan gusti bukan sekadar impersonal semata; hubungan ini merupakan suatu hubungan yang lebih personal saling tanggap dan tanggung jawab. Agaknya hubungan ini dicirikan adanya perhatian dan cinta mirip keluarga".

J. Joseph Errington, "Self and Self-Conduct Among the Javanese 'Priyayi Elite'", *American Ethnologist* 11 (2), 1984, hal. 277. Juga lihat Pierre Brocheux, "Moral Economy or Political Economy? The Peasants are Always Rational", *Journal of Asian Studies*, Vol. XLII, Number 4, August 1983, hal. 793.



E. FAKTA YANG DIHADAPI SEKTOR INFORMAL PERSAMPAHAN

Studi dilakukan Januari 2023 sampai Januari 2026 ditemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi pemulung, pelapak, pemilah dan pekerja pencacahan plastik di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu, diantaranya:

- **Mereka bekerja di tempat rawan penyakit, benda keras (paku, kawat, beling, jarum suntik, tusuk sate), zona TPST/TPA rawan longsor. Paling mengerikan Sampah Longsor.**
- **Mereka tinggal di gubuk-gubuk kumuh, bau bacin dan sanitasi buruk di lingkungan tercemar** menggambarkan kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.
- **Tidak mendapat suplai air bersih.**
- **Income rendah** karena pendidikan dan skill rendah (mayoritas tidak tamat SD dan tamat SD), terutama pemulung, tukang sortir, pelapak dan pekerja pencacahan plastik. Penghasilan perempuan Rp 45.000-60.000/hari, laki-laki Rp 70.000-100.000/hari. (Tidak ada standar upah).

**Gunung sampah TPST Bantargebang
longsor menelan 13 korban, 7 diantaranya
meninggal dunia (APPI/KPNas, 8/3/2026)**





Gubuk-gubuk pemulung berdempetan, kumuh bercampur tumpukan sampah rawan kebakaran. (APPI/ YPLHPI, 18 & 21/4/2022)

PEMULUNG TERANCAM GAS-GAS SAMPAH

Belakangan laporan menghebohkan bertajuk “Spotlight on the Top 25 Methane Plume in 2025: Landfills”, diliris UCLA School of Law pada 20 April 2026, Bantargebang dinobatkan sebagai penyumbang emis gas metana terbesar kedua di dunia. Bantargebang hanya kalah dari TPA Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina.

Sepuluh TPA dengan metana terbesar di dunia; 1. TPA Compo de Mayo, Provinsi Buenor Aires, Argentina dengan laju emisi 7,6 ton/jam. 2. TPA Bantargebang Bekasi, Jawa Barat, Indoneisa dengan laju emisi 6,3 ton/jam. 3. TPA Jeram Selangor, Malaysia dengan laju emisi 6,0 ton/jam. 4. TPA Secunderabad, Telangana, India dengan laju 5,9 ton/jam. 5. Tilttil, Cile dengan laju emisi 5,5 ton/jam. ...

Setiap hari pemulung dan mereka yang bekerja di TPST Bantargebang terpapar berbagai gas sampah, terutama gas metana (CH₄), karbondioksida (CO₂) dan lainnya. Gas-gas sampah ini sangat berbahaya ditambah debu yang mengganggu pernafasan. Merupakan sumber utama penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), radang paru-paru, TBC, dan lainnya.

10 TPA DENGAN METANA TERBESAR DI DUNIA

No	Lokasi	Laju Emisi Ton/Jam
1	Campo de Mayo, Provinsi Buenos Aires, Argentina	7.6
2	Bantargebang Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	6.3
3	Jeram, Selangor, Malaysia	6.0
4	Secunderabad, Telangana, India	5.9
5	Tilttil, Cile	5.5
6	Talngante, Cile	5.2
7	Riyahd, Arab Saudi	5.1
8	Kamphaeng Saen, Tailan	5.0
9	Penco, Biobío, Cile	5.0
10	Fazenda Rio Grande, Paraná, Brazil	4.9





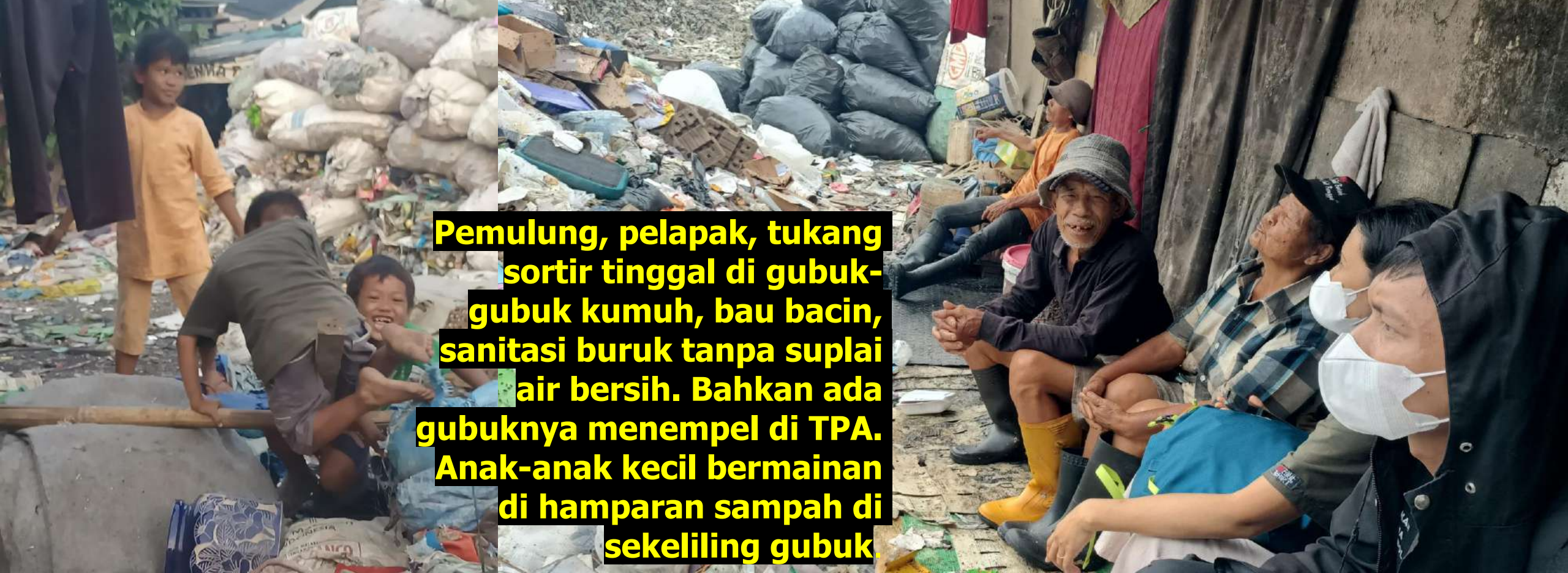
- **Tergantung pada bos.** Pemulung berada paling bawah struktur ekonomi persampahan dan sangat tergantung pada pelapak (bos) serta rawan dieksploitasi.
- **Mereka terjerat sistem ijon dan ekonomi rente, bunga pinjaman sangat tinggi, 10-20% per bulan, bahkan lebih.** Bank Emok, bank rente, bank mingguan, judi online sangat marak. Akibatnya banyak yang terjerat hutang.
- **Kasus *stunting* (malnutrisi)** melanda anak-anak pemulung.
- **Kasus kawin muda** akibat kecelakaan pergaulan atau dipaksa orang tua.
- **Ketika pemulung meninggal dunia kesulitan mencari biaya** untuk bayar lahan kuburan, kain kafan, dan biaya lainnya.

Apalagi kalau mayatnya harus diantara pakai mobil *ambulance* ke kampung halaman, seperti Indramayu, Cirebon, Semarang, Madura, dll. Biasanya mencari bantuan, istilahnya "kecrekan" ke gubuk-gubuk.

- Masih ada **anak kecil diajak mengais sampah di TPST/TPA** (pencemaran udara: debu, gas metana (CH₄), CO₂, dll)
- **Belum mendapat pengakuan** secara penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah.
- **Tidak ada dukungan permodalan, teknologi, pasar dan informasi daur ulang dari pemerintah.**
- **Keamanan kerja belum terjamin.**
- **Jaminan kesehatan** bila terjadi kecelakaan bagi pemulung baru sebagian kecil yang diberi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- **Harga pungutan sampah sering turun drastis dan tidak stabil** (harus ada standar harga).



F. PERMUKIMAN SEKTOR INFORMAL PERSAMPAHAN



G. KONDISI MCK PEMULUNG ALAKADARNYA





H. PETAKA LIMBAH MEDIS SEKTOR HANTUI PEMULUNG



- **Pemulung diminta bosnya (pelapak) agar mengambil limbah medis, seperti selang dan botol infus, bekas botol obat-obatan, bekas peralatan makan, dll.**
- **Limbah medis dibuang ke TPA dan TPS liar bekerja sama dengan pihak internal rumah sakit, klinik Kesehatan dan Puskesmas (Fanyankes).**



REPORTER'S NOTEBOOK

Features | Coronavirus pandemic

Indonesia's pandemic-fuelled problem: Mounds of medical waste

From masks and gloves to IVs and COVID tests, reporter Adi Renaldi visits the landfills and dumpsites that are now home to toxic medical waste.



Foto: Garry Lotulung



Menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah limbah medis yang dibuang di TPA di Jakarta dan sekitarnya meningkat 500 persen selama pandemi Covid-19.

I. PEMULUNG DAN PEMILAH SAMPAH JADI TAMENG TPS ILEGAL

Para bos pengelola tempat pembuangan sampah (TPS) liar selalu berdalih karena ciptakan lapangan kerja dan membantu pemerintah kurangi sampah. Sementara mereka melakukan *open dumping* secara brutal. Meraup keuntungan ekonomi sangat besar.

Sebaliknya begitu kontras, pemulung dan pemilah sampah memperoleh *income* kecil, tinggal di bedeng/gubuk kumuh, bau bacin dan sanitasi buruk sekali. Ketika hujan terendam *leachate* dan dikerumuni belatung dan lalat. Bahkan, hidupnya terlilit hutang dan rente. Hidup pemulung dan pemilah sampah di TPS liar cukup menyedihkan, yang penting bisa bertahan hidup. Tidak ada perlindungan hak azasi manusia (HAM). Sungguh dunia ini kejam dan tidak adil.



Puluhan tahun

Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto mengatakan, terdapat penampungan sampah liar yang beroperasi sejak tahun 2000-an. Dia yang rutin mengamati persoalan sampah itu salah satunya menyoroti praktik penampungan ilegal di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.



KOMPAS/STEFANUS ATO

Tumpukan sampah menggunung di salah satu penampungan sampah liar di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (24/5/2025) siang. Tempat penampungan sampah liar ini berada persis di tepi Kali Bekasi.

Menurut Bagong, pelanggaran sangat serius telah berlangsung selama puluhan tahun. Contohnya, sejumlah titik penampungan sampah liar beroperasi di Kabupaten Bekasi. Namun, dampak pencemaran lingkungan dari lindi dan air limbahnya mengalir sampai Kota

KOMPAS/STEFANUS ATO

PELIK PENGELOLAAN SAMPAH, TPS LIAR BERBAYAR BERMUNCULAN

Siapa yang diuntungkan?!



youtube.com

Sampah Jakarta Masuk ke TPS Ilegal, Bukan TPST Bantar Gebang, Siapa yang Diuntungkan?

J. HARGA SAMPAH PUNGUTAN MENURUN TERUS

1. Pemulung mengais sampah gabrungan/campuran dari TPST Bantargebang, kemudian dijual kepada para bos/pelapak. Ketika harga normal kisaran Rp 1.200-1.400/kg, sekarang turun drastis, saat ini hanya Rp 700-800/Kg. Akibat turunnya harga hampir semua jenis sampah selama lebih setahun menyebabkan kehidupan pemulung semakin menderita. Daya beli pemulung sangat lemah.
2. Sampah gabrungan dipilah dalam partai besar, seterusnya disortir lagi dalam partai kecil siap dicacah.
3. Siklusnya, sampah plastik dipilah sesuai spesifikasinya, plastik kresek pisah warna (putih, merah, hitam, sablon), plastik mainan, plastik emberan, PET, PE, LD, plastik Naso, PK, impek, ABS, dll.

4. Sampah kertas, logam, beling dipilah sesuai spesifikasinya. Harganya menjadi semakin tinggi setelah dipilah, misal harga PET bersih Rp 4.000-4.500/kg, plastik ember Rp 2.300/kg, dll. Ketika harga normal (bagus) harga PET mencapai Rp 8.000/kg, sedang harga plastik ember mencapai Rp 3.500/kg.
5. Sampah kertas, logam, beling dipilah sesuai spesifikasinya. Harganya menjadi semakin tinggi setelah dipilah, misal harga PET bersih Rp 4.000-4.500/kg, plastik ember Rp 2.300/kg, dll. Ketika harga normal (bagus) harga PET mencapai Rp 8.000/kg, sedang harga plastik ember mencapai Rp 3.500/kg.
6. Harga-harga pilah tersebut pada tingkat pencacahan plastik cukup variatif. Pekerjaan sortir dilakukan secara borongan, Rp 500-600/kg. Upah harian pilah sampah, untuk perempuan Rp 35.000-50.000/hari dan lelaki Rp 50.000-75.000/hari. Upah lelaki lebih tinggi disbanding dengan Perempuan. Alasannya lelaki lebih kuat dan cepat.
7. Para pekerja pemilahan sampah dan pencacahan tidak mendapat jaminan kesehatan, apalagi jaminan kesejahteraan.

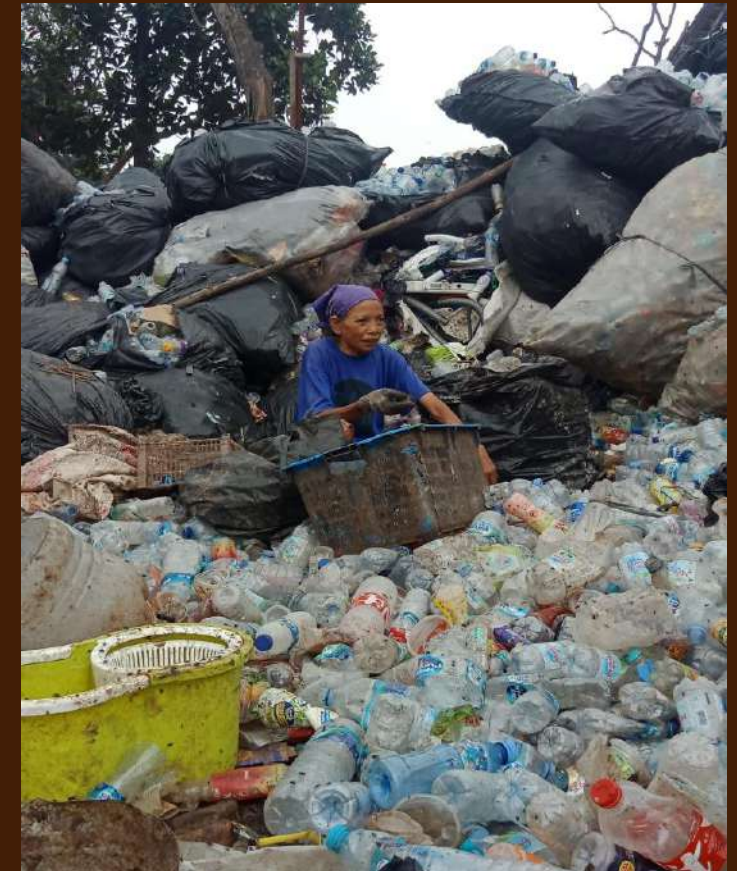


HARGA SAMPAH PUNGUTAN MENURUN TERUS, PEMULUNG BINGUNG

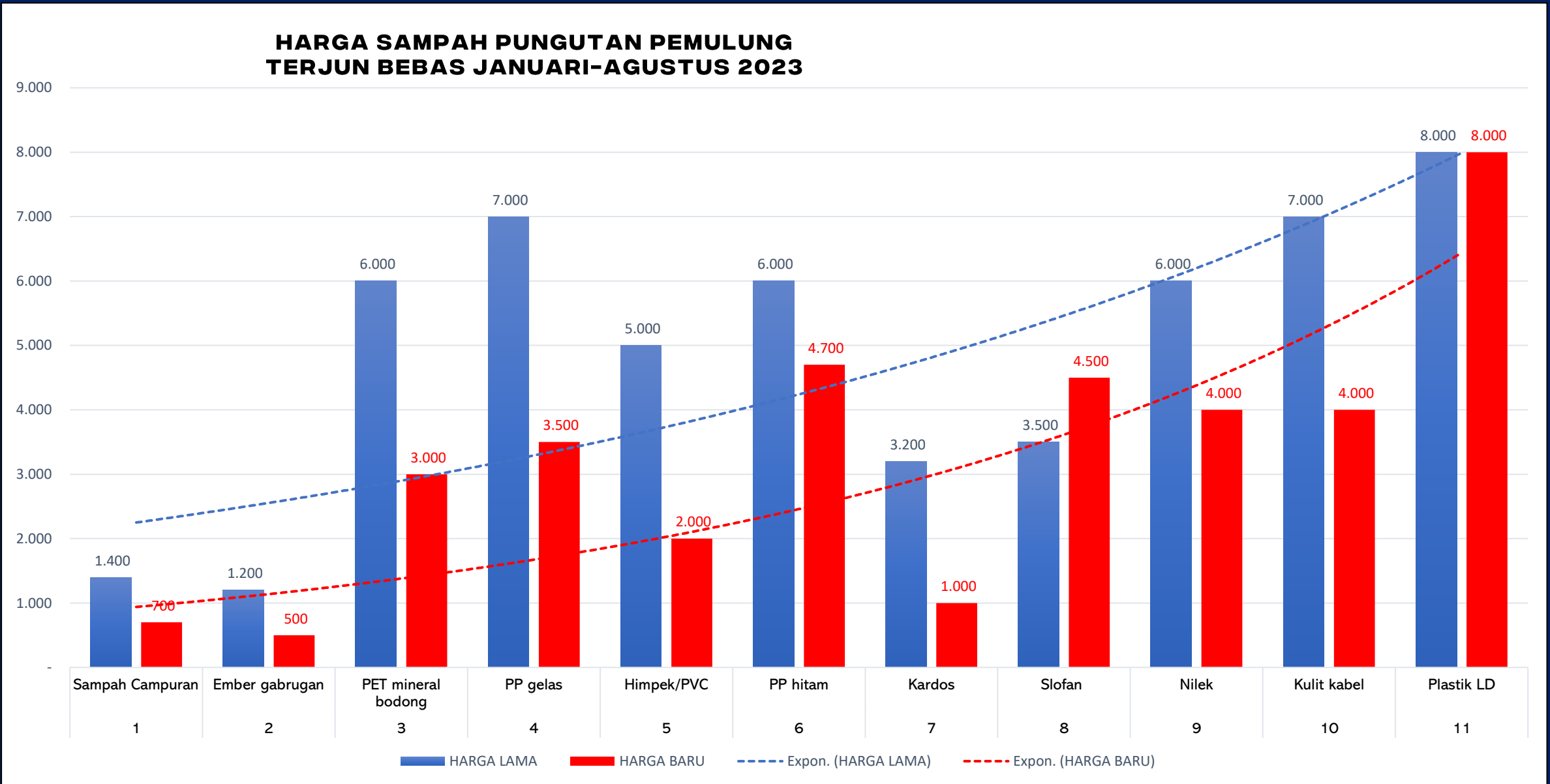
Penurunan harga Januari-Agustus 2023 merupakan paling parah sepanjang sejarah kurun waktu lima tahun belakangan. Situasi tersebut sungguh sangat menyulitkan kehidupan mereka. Masa depan pelaku *circular economy* ini semakin buram. Kondisi tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang; pemerintah, dunia usaha, DPR RI, dll dan dipublikasikan di berbagai media massa daerah dan nasional.

Sekarang harga kertas kardos cuma Rp 1.000/kg, dulu ketika harga normal Rp 3.200/kg pada tingkat pemulung. Duplek Rp 300/kg, dulu Rp 700/kg. Ember gabrungan Rp 500/kg, dulu Rp 1.200/kg. PET bodong Rp 3.000/kg, dulu Rp 6.000/kg. PP gelas Rp 3.500/kg, dulu Rp 7.000/kg. Himpek/PVC Rp 2.000/kg, dulu Rp 5.000/kg. PP hitam Rp 4.700/kg, dulu Rp 6.000/kg.

Plastik slofan (bekas kemasan minyak goreng, diterjen, dll) Rp 3.500/kg, dulu Rp 4.500/kg. Nilek Rp 4.000/kg, dulu Rp 6.000/kg. Kulit kabel Rp 4.000/kg, dulu Rp 7.000/kg. Plastik LD harga stabil Rp 8.000/kg. Berikut disajikan dalam diagram batang.



Harga Sampah Pungutan Pemulung Terjun Bebas (Per Kg) Januari-Agustus 2023



Sumber: Data primer diolah, APPI & KPNas, 5 dan *updating* 23 Agustus 2023

HARGA CACAHAN PLASTIK TURUN TERUS, USAHA JADI BANGKRUT

Contoh beberapa harga sampah cacahan turun drastis saat ini (Agustus 2023). Harga cacahan emberan ketika harga stabil mencapai Rp 8.200/kg, sekarang jatuh menjadi Rp 5.000/kg; PP gelas 12.000/Kg, sekarang cuma Rp 6.000/Kg; PET mineral bodong Rp 6.000/Kg, sekarang Rp 4.700/Kg; Himpek Rp 5.000/Kg, sekarang Rp 2.000/Kg; PP hitam Rp 6.000/Kg, sekarang Rp Rp 4.700/Kg;

LD warnal/bening stabil Rp 12.000/Kg (LD bening seperti botol infus); Muntik kemasan gelas minuman Rp 7.500/Kg, sekarang tinggal Rp 2.000/Kg; Tali klem PK putih Rp 7.500/Kg, sekarang hanya Rp 2.000/Kg; Tali klem kuning Rp 7.000/Kg, sekarang Rp 4.700/Kg.

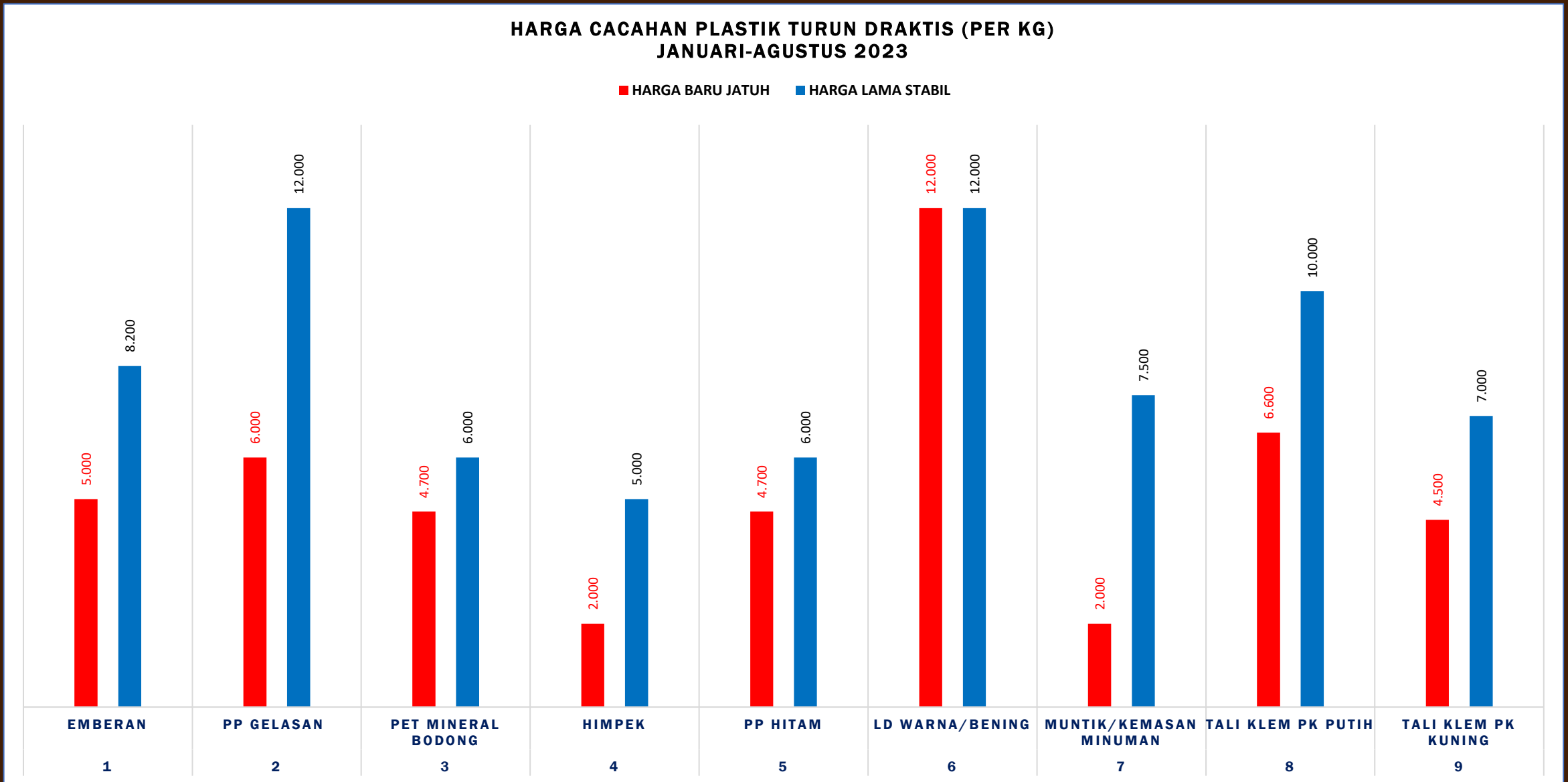


SEKTOR PENCACAHAN PLASTIK – BAHAN BAKU DAUR ULANG – BAHAN BAKU PLASTIK



Model media/alat sortir sampah tingkat pelapak. Tiap hari kaum perempuan dan anak-anak bekerja sortir sampah guna mendapatkan uang dalam menyokong keberlanjutan keluarga (Bagong Suyoto, 2011, 2012).

Harga Cacahan Plastik Turun Draktis (Per Kg) Januari-Agustus 2023



Sumber: Data primer diolah, APPI & KPNas, 5 dan *updating* 23 Agustus 2023



Harga Cacahan Plastik Turun Draktis Per 29 November 2025

No	Jenis Plastik	Harga Bagus/Kg	Harga Turun/Kg
1	PET/aqua bodong	13.500	7.000
2	Gelasan/PP gelas	13.000	6.000
3	PP PK	9.000	6.800
4	Ember	8.000	4.700
5	Naso	10.500	8.000

Sumber: Data primer, KPNas/APPI, 29 November 2025

Harga Sampah Pungutan Pemulung di sekitar TPST Banatrgembang

No	Jenis Barang	Harga Bagus /Kg	Harga Turun/Kg
1	Sampah campuran (gabrugan)	1.400	700-800
2	Nilek/lapak (campuran)	4.000	2.000
3	PET/botol mineral	7.500	4.000
4	PP gelas	7.000	3.000
5	PP PK	6.000	3.700
6	Karpet	1.200	500
7	Beling	1.350	800
8	Beling warna hijau	1.200	400
Sumber: Data primer, KPNas/APPI, 29 November 2025			

HARAPAN PEMULUNG BANTARGEBAK INGIN HIDUP LAYAK DAN SEJAHTERA



Foto: KPNas/APPI, 6/5/2026



Foto: KPNas/APPI, 10/5/2026

K. TUNTUTAN DAN PERMINTAAN KOMUNITAS PELAKU *CIRCULAR ECONOMY* ARAS BAWAH

Berdasarkan pengalaman dan fakta lapangan yang dialami para pelaku *circular economy* aras bawah betapa beratnya menghadapi situasi buruk, akibat harga-harga sampah pungutan dalam negeri terus anjlok, tanpa adanya pertolongan dari institusi resmi. Sebagian modalnya terus susut dan bangkrut. Negara dan dunia usaha harus hadir menolong. Oleh karena itu Komunitas pemulung, pelapak dan pencacahan plastik menuntut dan meminta pada pemerintah dan dunia usaha sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi/pendampingan berkelanjutan.
2. Pemerintah harus menstabilkan harga-harga berbagai sampah pungutan dalam negeri.
3. Pemerintah dan dunia usaha daur ulang harus melayani, melindungi keberadaan sektor informal persampahan, dan memfasilitasi teknologi, permodalan, pasar daur ulang, serta informasi secara cepat dan tepat.
4. Pemerintah dan dunia usaha memfokuskan sampah dalam negeri sebagai bahan baku industri daur ulang.

Lanjutan

5. Pemerintah dan dunia usaha daur ulang mesti mengurangi impor bahan baku, setidaknya 25% bahan baku impor dan 75% bahan baku dalam negeri. Lebih bijaksana melakukan stop impor bahan baku dan sampah dari luar negeri. Hal ini akan menjadi benteng utama terhadap kekuatan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan terakait.
6. Pemerintah harus memberikan insentif kepada sektor informal pengelola sampah sebagai bagian dari pelaku *circular economy* (mandat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Dunia usaha sebagai produsen kemasan plastik dan lainnya harus memberikan dukungan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Extended Producer Responsibility* pada pemulung, pelapak dan pencacahan plastik bagian dari rantai *circular economy*.
8. Pemerintah perlu memikirkan perbaikan pemukiman pemulung, buruh sortir dan memfasilitasi serta menyediakan rumah tumbuh sehat demi kelangsungan hidup pemulung dan keluarganya.
9. Memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan dan pengobatan gratis.

L. DEFINISI SEKTOR INFORMAL

Sektor Informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berksla kecil, yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan.

M. CIRI-CIRI SEKTOR INFORMAL

- Kegiatan usaha umumnya sederhana.
- Skala usaha relatif kecil.
- Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin uzaha.
- Untuk bekerja sektor informal lebih mudari daripada sektor formal.
- Tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah.
- Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil.
- Usaha-usaha di sektor informal sangat beragam.



ERA PROYEK WASTE TO ENERGY, BAGAIMANA NASIB DAN MASA DEPAN PEMULUNG?

Proyek WtE dibicarakan sejak 2000-an, bahkan DKI mau bangun 4-5 titik di wilayah *indoor*. Ide itu tampak akan terealisasi dengan adanya Prepres No. 109/2025. Operasional WtE butuh pasokan sampah cukup banyak untuk dibakar.

KEBIJAKAN Kehebatan "Waste to Energy" Jadi Solusi Kedaruratan Sampah?

Proyek WtE hanya menyelesaikan 13 persen masalah sampah di Indonesia. Artinya, porsi terbesar penyelesaian isu bertumpu pada metode lain dan harus serius dijalankan.

Oleh Bagong Suyoto
09 April 2026 16:01 WIB

Kedaruratan sampah menjadi isu utama pembicaraan entitas pemerintah pusat dan kabupaten/kota, terutama yang



Home > Megapolitan > Proyek Waste to Energy Kot...

Proyek Waste to Energy Kota Bekasi Dibayangi "Korupsi dan Gratifikasi"?

Senin, 15 Jun 2026, 13:32 WIB

Oleh Bagong Suyoto, Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Siapa yang akan membayar *tipping fee* pada korporasi yang membangun dan mengelola *Waste to Energy (WtE)* di Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam kurun 30-40 tahun? Berapa besaran *tipping fee* per ton sampah? Apakah pembayarannya cukup diambil dari produk energi listrik dan produk lain yang dihasilkan?



Megapolitan Daerah Nasional Luar Negeri

WASTE TO ENERGY

Indonesia Adopsi "Waste to Energy" ketimbang Inisiatif Lokal

Rabu, 15 Apr 2026, 09:38 WIB | Oleh: Bagong Suyoto

Tujuan Perpres tersebut guna: a. mengatasi Kedaruratan Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat akibat tidak terkelolanya timbulan sampah dan timbunan sampah dalam skala besar; b. menangani timbulan sampah melalui PSEL sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi nasional; dan c. mendorong Pengelolaan Sampah yang mengacu pada azas pencemar membayar (*polluter pay principle*) agar setiap orang bertanggungjawab terhadap sampah yang

BAGONG SUYOTO

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP: STOP IMPOR PLASTIK 2025, PERKETAT IZIN IMPOR KERTAS



Sindir, 04 Nov 2024, 16:47 WIB
Gebrakan Berani Menteri Lingkungan Hidup
Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPN) bersama Menteri LH Hanif Falah Furuatig
Foto: Karan Jakarta/EPNas



Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHI) dan Yayasan PRABU Peduli Lingkungan

10 November 2024



TERIMA KASIH - 18 Juni 2026



Persekongkolan Jahat Memainkan Sampah Kota

Elite lokal hingga aparat sipil bersekongkol mengelola sampah harian Kompas yang terlibat saling tahu dan mengambil keuntungan. Investigasi Kompas periode Mei-Juni 2025 mengungkap, elite lokal hingga aparat sipil bersekongkol mengelola sampah warga secara ilegal. Mereka yang terlibat dalam perse... Lihat lainnya

LIPUTAN INVESTIGASI

KOMPAS

Sosok

Bagong Suyoto

Pendamping Para Pemulung

Bagong Suyoto menapaki jalan sumbu dengan mendampingi para pemulung di Bantargebang sejak 26 tahun lalu. Langkah yang tak dipilih banyak orang, tetapi dengan tujuan baik, yakni mengelola sampah dengan bijak dan berkesadaran lingkungan.

Aditya Diveranta



Semua bermula dari keresahan terhadap situasi pengelolaan sampah di area Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada 1999. Saat melihat pengelolaan sampah berantakan, limbah kian serampangan, dan menciptakan penampungan sampah liar, sosok lelaki laki-laki tergerak. Dia menaruh jalan dengan hadir bersama para pemulung.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Diambil agas yang itu, ada hal-hal yang belakangan disadari. Meski tahu potensi ekonomi sampah, ternyata pemulung tak begitu paham tentang dampak lingkungan dari pengelolaan limbah tersebut.

Bagong Suyoto
Lahir: November, 07 November 1965
Pendidikan: SMA 1 Kota Malang (1983-1984)
S-1: Jurusan Administrasi Negara (Universitas Brawijaya) (1989-1991)
S-2: Jurusan Ilmu Administrasi (Universitas Trilogi Baru) (2009-2011)
S-3: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015-2017)
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) (1984-1991)
Pegawai Negeri Swasta (PNS) (1991-2002)
Pegawai Negeri Swasta (PNS) (2002-2015)
Pegawai Negeri Swasta (PNS) (2015-2024)
Pegawai Negeri Swasta (PNS) (2024-2025)
Pegawai Negeri Swasta (PNS) (2025-2026)